

Studi Keacehan - Pertemuan 12

Implementasi Syariat & Hukum
Nasional

Hierarki Hukum

- UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006.
- Qanun sebagai produk hukum daerah dengan kekhususan.
- Peran Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional.

UUPA & Kewenangan

- Memberikan otonomi khusus kepada Aceh.
- Mengatur implementasi syariat Islam di bidang jinayat, ibadah, dan muamalah.
- Mengakui lembaga adat dan ulama sebagai bagian sistem hukum.
- Membuka ruang harmonisasi dengan hukum nasional.

Qanun & Implementasi

- Qanun Jinayat: mengatur tindak pidana berbasis syariat.
- Qanun Hukum Keluarga Islam: pernikahan, waris, wakaf.
- Implementasi melalui lembaga Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah.
- Tantangan: efektivitas, keadilan, dan persepsi publik.

Peradilan & Eksekusi

- Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus di Aceh.
- Hukum acara menyesuaikan dengan KUHAP nasional.
- Eksekusi putusan: dari cambuk hingga denda.
- Koordinasi antara aparat hukum daerah dan nasional.

Isu Diskriminasi & Perlindungan

- Kritik atas praktik hukuman yang dianggap diskriminatif.
- Perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan.
- Kesetaraan gender dalam penerapan qanun.
- Perlunya pendekatan syariat yang inklusif dan adil.

Harmonisasi Regulasi

- Upaya sinkronisasi qanun dengan UU nasional.
- Mekanisme judicial review di Mahkamah Agung.
- Keterlibatan akademisi dan praktisi hukum.
- Harmonisasi sebagai jembatan integrasi nasional.

Pendidikan Hukum Masyarakat

- Literasi hukum syariat bagi masyarakat Aceh.
- Kampanye edukasi di sekolah dan perguruan tinggi.
- Sosialisasi melalui khutbah, media massa, dan komunitas.
- Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Rekomendasi Pembaruan

- Menegakkan syariat dengan prinsip keadilan substantif.
- Meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana syariat.
- Mendorong riset hukum syariah untuk kebijakan berbasis data.
- Membangun model integrasi hukum Islam dan hukum nasional.

Aktivitas & Tugas Pertemuan 12

- Forum diskusi: 'Bagaimana qanun Aceh dapat selaras dengan hukum nasional?'.
- Tugas Analisis Kritis (1000–1200 kata): kajian pasal/putusan Mahkamah Syar'iyah dan implikasinya.
- Tujuan: melatih kemampuan analisis hukum syariah dalam kerangka nasional.